



PENETAPAN

Nomor: 46/Pdt.P/2022/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan (itsbat) Nikah yang diajukan oleh:

**Hasnawin bin Sattung**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Petaani Sawit. bertempat tinggal di Jalan Kandung RT.05 Desa Sekaduyan Taka, Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Pemohon I**;

**Sairan Guru Ra'e binti Mohammad Ndori**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Jalan Kandung RT.05 Desa Sekaduyan Taka, Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 18 Februari 2022 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 22 Februari 2022 dengan register perkara Nomor: 46/Pdt.P/2022/PA.Nnk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal **25 November 2019** di **Morotai Besar, Kalabakan, Malaysia**.

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan No.46/Pdt.P/2022/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam kampung yang bernama Bacrossi karena Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan Pemohon II sudah putus komunikasi dengan saudara/keluarga Ayah Kandung Pemohon dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Maming dan Rustam.
3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu.
4. Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa seperangkat alat solat dibayar tunai.
5. Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 24 tahun dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan.
6. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam.
7. Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain.
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
  - a. **Ziban Aqel Hanafi bin Hasnawin, umur 1 tahun 6 bulan;**
  - b. **Fayyan Gibran, umur 7 bulan;**
9. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah,

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan No.46/Pdt.P/2022/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketika Para Pemohon berada di Malaysia Para Pemohon memiliki Paspor dan dokumen-dokumen lainnya namun Para Pemohon sedang berada di Camp dan tidak bisa keluar dari Camp karena ikatan kerja;

10. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
11. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya.
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Hasnawin bin Sattung**) dengan Pemohon II (**Sairan Guru Ra'e binti Mohammad Ndori**) yang dilaksanakan pada tanggal **25 November 2019** di **Morotai Besar, Kalabakan, Malaysia**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I dengan Pemohon II telah hadir di persidangan sebagaimana mestinya, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Pemohon I maupun Pemohon II pada akhirnya sama-sama menyatakan tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikan dan mohon penetapan;

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan No.46/Pdt.P/2022/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon I, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1.
2. Fotokopi KTP Surat Keterangan atas Pemohon II, , dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ibu kandung Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4
5. Lampiran fotokopi Surat Keterangan Domisili, yang dikeluarkan oleh Kades Sekaduyan Taka tanggal 8-7 2021

## B. Saksi

Supardi bin Ali umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Kandungangan RT.06 Dewi Sartika RT.06, Desa Sekaduyan Taka, Kecaatan Seimenggaris, Kabupaten Nunukan, Kalimantan utara, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Anak angkat para Pemohon;

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan No.46/Pdt.P/2022/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan, namun diberi tahu oleh Pemohon I dan Pemohon II menikah di Morotai Besa, Kalabakan, Malaysia pada tahun 2019;
- Bahwa menurut cerita Pemohon I dan Pemohon II mereka menikah menurut agama Islam, dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 25 November 2019 di Morotai Besar, Kalabakan, Malaysia;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Paman Pemohon II mewakilkan kepada imam kampung bernama Bacorossi karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut ada maharnya seperangkat alat solat;
- Bahwa pada saat menikah, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan ikatan pertalian nasab, semenda, atau sepersusuan dan tidak ada halangan lain untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki pasangan (suami atau istri) yang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan nikah agar memiliki dasar hukum pernikahan yang sah dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya salah satunya Akta Kelahiran anak;

1. Raup bin Laining, umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Kandung RT.005, Desa Sekaduyan Taka, Kecamatan Seimenggaris, Kabupaten Nunukan, Kalimantan utara, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah teman para Pemohon;

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan No.46/Pdt.P/2022/PA.Nnk



- Bahwa saksi tidak hadir di acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tahu dari cerita para pemohon yang menikah pada tahun 2019 di Morotai Besar Kalabakan Malaysia;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan ikatan pertalian nasab, semenda, atau sepersusuan dan tidak ada halangan lain untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki pasangan (suami atau istri) yang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan nikah agar memiliki dasar hukum pernikahan yang sah dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa terhadap semua keterangan para saksi tersebut, Pemohon I maupun Pemohon II sama-sama membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I maupun Pemohon II sama-sama menyatakan tidak ada lagi keterangan maupun bukti yang akan disampaikan serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan menyatakan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilakukan oleh orang yang beragama

*Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan No.46/Pdt.P/2022/PA.Nnk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 20046 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II betapa pentingnya pencatatan perkawinan agar suami dan istri memiliki dasar yuridis dalam setiap tindakan yang berhubungan dengan keluarga;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.3, dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai Pasal 1460 KUHPerdara *juncto* Pasal 285 RBg merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Meterai, sehingga Majelis menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal para Pemohon yang berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 berupa Kartu Keluarga diperkuat oleh Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sekaduyan Taka menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Pemohon I yang berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Nunukan;

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan No.46/Pdt.P/2022/PA.Nnk



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 menjelaskan mengenai Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga Pemohon I dan Pemohon II yang sesuai dan menguatkan bukti P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1946 KUHPerdara Jo. Pasal 1462 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19046-1908 KUHPerdara jo. Pasal 308-309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan alat-alat bukti di persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 25 November 2019 di Morotai Besar, Kalabakan, Malaysia bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai menurut ketentuan syariat Islam, dengan wali nikah Paman Pemohon II mewakilkan kepada imam kampung bernama Bacorossi karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal;
- bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, dan di antara keduanya tidak ada hubungan pertalian nasab, semenda, sesusuan, serta tidak ada halangan lain untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa hingga saat ini antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap rukun dan harmonis sebagai suami isteri hingga saat ini telah dikaruniai 2 orang anak;



- bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah sama-sama tidak memiliki pasangan (istri/suami) yang lain;
- bahwa Penetapan Pengesahan Nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut diperlukan untuk bukti otentik serta untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan hukum untuk menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam (vide Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 19464 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa pernikahan dikatakan sah secara Hukum Islam adalah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan serta tidak ada halangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 s.d. Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan dalam permohonannya tentang pernikahan yang mereka lakukan telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, maka telah senada dengan syarat keabsahan dakwaan/pengakuan yang diutarakan oleh pakar hukum Islam Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه  
من نحو ولي وشاهدين عدول ورضاها إن شرط بأن كانت  
غير مجبرة فلا يكفي فيه الاطلاق

Artinya: untuk keabsahannya suatu dakwaan/pengakuan tentang adanya pernikahan dengan seorang wanita, tidak cukup hanya pengakuan saja, tetapi disyaratkan harus mampu menjelaskan keabsahan dan terpenuhinya syarat-syarat pernikahan, seperti adanya wali dan dua saksi yang adil, serta kerelaan wanita tersebut (bagi wanita yang ghairu mujbirah);



Menimbang, bahwa sebuah dakwaan/pengakuan tidak dapat diterima tanpa adanya pembuktian sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhuma*:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِكُذُوبِهِمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين)

Artinya: dari Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhuma*, sesungguhnya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda "Jika semua orang diberikan (apa yang mereka dakwakan) hanya dengan dakwaan mereka, maka akan banyak orang yang mendakwakan harta dan jiwa orang lain. Oleh karena itu (agar tidak terjadi hal tersebut), maka bagi pendakwa harus mendatangkan bukti dan bagi terdakwa yang mengingkari harus bersumpah." (Hadits hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqy dan yang lainnya, dan sebagian hadis tersebut terdapat dalam *As-Shahihain*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta di atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 25 November 2019 tersebut terbukti sah, memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan untuk menikah (vide Pasal 14-44 Kompilasi Hukum Islam). Pernikahan dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon menurut agama Islam tanpa adanya halangan Perkawinan, diakadkan oleh wali yang berhak menikahkannya, disaksikan oleh 2 orang saksi yang memenuhi syarat, serta terdapat mahar yang disepakati;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah di Bawah Tangan yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa : *"Pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan hukumnya adalah sah, tetapi haram jika terdapat madharrat"*;

Menimbang bahwa oleh karena perkara permohonan pemohon I dan pemohon II dikabulkan, maka kepadanya diperintahkan untuk mendaftarkan pernikahan kepada KUA tempat para pemohon bertempat tinggal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa untuk memenuhi unsur Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 19464, maka diperintahkan kepada para pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada KUA tempat tinggal para pemohon untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 19464 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon poin (2) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 46 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 20046 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Hasnawin bin Sattung) dengan Pemohon II (Sairan Guru Ra'e binti Mohammad Ndori) yang dilaksanakan pada tanggal 25 November 2019 di Morotai Besar, Kalabakan, Malaysia;

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan No.46/Pdt.P/2022/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya, kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal para Pemohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 520.000 ( lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dibacakan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1443 Hijriah, oleh kami Tb. Agus Setiawarga., S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Zuhriah, S.H.I., M.H. dan Feriyanto, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Norhuda, S.H. sebagai Panitera, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

ttd

**Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota.

ttd

**Zuhriah, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

ttd

**Feriyanto, S.H.I., M.H.**

Panitera,

ttd

**Norhuda, S.H.**

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan No.46/Pdt.P/2022/PA.Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	520.000,00

( lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Petikan Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya.

Nunukan, 11 Maret 2022

**Panitera Pengadilan Agama Nunukan**

**Norhuda, S.H.**

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan No.46/Pdt.P/2022/PA.Nnk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)